

Nova Putri Amanda Havizia. *Penegakan Hukum Terhadap Anak di Bawah Umur yang Menjadi Pengedar Obat Tanpa Izin Edar Jenis Trihexyphenidyl (Studi Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN Dmk)*. 2022. Pembimbing Dr. Dra. Dyah Listyarini, S.H., M.H., M.M. Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Bahasa Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Penegakan Hukum Terhadap Anak di Bawah Umur yang Menjadi Pengedar Obat Tanpa Izin Edar Jenis *Trihexyphenidyl* (Studi Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN Dmk) dengan permasalahan (1) Bagaimana penegakan hukum terhadap anak di bawah umur sebagai pelaku tindak pidana pengedar obat tanpa izin edar jenis *trihexyphenidyl* dalam Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN Dmk? (2) Apa yang menjadi hambatan Hakim Pengadilan Negeri Demak dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak di persidangan?

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat analisis deskriptif dengan metode yuridis normatif, yaitu dengan menggunakan bahan penelitian dari data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, selain itu penelitian lapangan oleh penulis melalui wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Demak.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah (1) Penegakan hukum terhadap anak di bawah umur sebagai pelaku tindak pidana pengedar obat tanpa izin edar jenis *trihexyphenidyl* dalam Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN Dmk, sudah mematuhi norma hukum yang berlaku. Semua unsur tindak pidana peredaran obat tanpa izin edar sebagaimana diatur dalam Pasal 197 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi. Dan untuk pertimbangan Hakim terhadap tindak pidana anak tersebut telah sejalan dengan aturan. Pemrosesan dengan cara diversifikasi tidak dimungkinkan menurut ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA. Hakim menjatuhkan hukuman pidana kepada anak pelaku dengan pidana tindakan berupa menjalani perawatan di LKSA Pondok Pesantren Raden Sahid di Desa Mangunan Lor Demak selama 5 (lima) bulan dan mengikuti pelatihan kerja sebagai pengganti dari pidana denda selama 1 (satu) bulan di LKSA Pondok Pesantren tersebut dengan mempertimbangkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Laporan Pembimbing Kemasyarakatan, pledoi dari Penasihat Hukum Anak, fakta-fakta di persidangan dan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari terdakwa anak. (2) Hambatan Hakim Pengadilan Negeri Demak dalam memberikan perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana pengedar obat tanpa izin edar dalam proses persidangan antara lain anak takut komunikasi (bicara), keterbatasan tenaga profesional psikolog dalam melindungi dan memahami kondisi mental anak demi memberikan perlindungan hukum kepada anak, rendahnya perhatian organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan tentang tindak pidana anak.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Anak di Bawah Umur, *Trihexyphenidyl*

ABSTRACT

This research is entitled Law Enforcement Against Minors Who Become Drug Dealers Without a Circulation Permit *Trihexyphenidyl* (Studi Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN Dmk) with the problems (1) How is law enforcement against minors as perpetrators of criminal acts of drug dealers without a distribution permit for the type of *trihexyphenidyl* in Decision Number 9/Pid.Sus-Child/2020/PN Dmk? (2) What are the obstacles for the Judges of the Demak District Court in providing legal protection to children at trial?

This study uses a qualitative approach that is descriptive analysis with normative juridical methods, namely by using research materials from secondary data collected through literature studies, in addition to field research by the author through interviews with the Judges of the Demak District Court.

The conclusions of this study are (1) Law enforcement against minors as perpetrators of drug trafficking crimes without a distribution permit for the type of *trihexyphenidyl* in Decision Number 9/Pid.Sus-Child/2020/PN Dmk, has complied with applicable legal norms. All elements of the crime of drug trafficking without a distribution permit as regulated in Article 197 of Law no. 36 of 2009 concerning Health has been fulfilled. And for the judge's consideration of the child's crime, it is in line with the rules. Processing by diversion is not possible according to the provisions of Article 7 paragraph (2) of Law no. 11 of 2011 concerning SPPA. The judge sentenced the perpetrator's child to criminal acts in the form of undergoing treatment at the LKSA Pondok Pesantren Raden Sahid in Mangunan Lor Demak Village for 5 (five) months and the fine was replaced by participating in job training for 1 (one) month at the LKSA Pondok Pesantren with considering the demands of the Public Prosecutor, the Report of the Community Advisor, the plea from the Child Legal Advisor, the facts at trial and the aggravating and mitigating matters of the child defendant. (2) Barriers to the Judges of the Demak District Court in providing protection to children who are perpetrators of drug trafficking crimes without a distribution permit in the trial process, among others, children are afraid of communication (talk), the limitations of professional psychologists in protecting and understanding the mental condition of children in order to provide legal protection to children, the low attention of social organizations about criminal acts of children.

Keywords: Law Enforcement, Minors, *Trihexyphenidyl*